PERAN PENGHULU DI DALAM NAGARI; SUATU KAJIAN TENTANG PEAN KEPEMIMPINAN ADAT DALAM NAGARI DEWASA INI

Oleh :

Syahrizal, Irareni

Nomor Kontrak : 065/J.16/PL/DIPA/V/2006

ABSTRAK

Kembali ke nagari sekarang pada prinsipnya kembali kepada sistem budaya dan politik lokal. Budaya dan politik lokal Minangkabau sangat erat kaitannya dengan keberadaan penghulu, merekalah yang menjadi pemimpin dalam kelompok kekerabatan. Dalam tradisi nagari di Minangkabau ninik mamak atau penghulu juga berperan dalam kehidupan politik nagari. Sekarang setelah kurang lebih 20 tatun di Sumatera Barat kehidupan bernagari menghilang dan baru dihidupkan lagi tahun 2000-an ini menarik untuk melihat bagaimana peran penghulu dalam nagari setelah kembali ke nagari.

Terdapat perbedaan peran penghulu dalarn nagari sebelum tahun 1980-an dengan setelah kembali ke nagari sekarang ini. Disekitar tahun 1980-an sebelum nagari menjadi desa peran penghulu sangat besar dalam pemerintahan nagari. Walaupun tidak ada ketentuan umumnya wali nagari pada masa tersebut adalah seorang Penghulu. Pada waktu itu lembaga yang ada di nagari hanya KAN dan BPRN dan sebagian besar anggota BPRN adalah anggota KAN. Sekarang sesuai dengan Perda banyak kelembagaan di dalam nagari seperti selain KAN dan BPRN ada MUN, MAMAS, Bundo Kanduang, dan Pemuda yang masmg-masingnya mempunyai 3 wakiI di BPRN.

Sekarang peran penghulu dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun 1980-an. KAN tidak terlalu menentukan lagi dalam pemerintahan nagari, tugas KAN adalah mengurus masalah sako dan pusako artinya mengurus masalah- masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan nagari dominan ditentukan oleh Wali Nagari dan perangkatnya. Wali nagari dalam tugasnya hanya bertanggung jawab pada BPRN yang anggota KAN nya hanya 3 orang. Penghulu dalam era kembali ke nagari sekarang merasa berbeda dengan yang dulu, sekarang penghulu tidak terlalu diperhitungkan.